

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan, berikut ini merupakan sejumlah kesimpulan yang diperoleh peneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022:

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi mayoritas tergolong “Sangat Kurang” dan 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Bungo digolongkan “Kurang”. Hal ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkontribusi rendah terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga semakin rendah pula kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan desentralisasi. Kota Jambi merupakan daerah yang menunjukkan kinerja yang paling baik sepanjang tahun 2020-2022 dan memiliki kemampuan yang “Cukup”.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 10 (sepuluh) daerah tergolong “Rendah Sekali” dengan pola hubungan yang Instruktif. Kinerja keuangan daerah yang dianggap paling terbaik sepanjang tahun 2020-2022 adalah Kota Jambi karena memiliki perolehan rasio di atas 25% dan masuk kategori kemampuan yang “Rendah” dengan pola hubungan konsultatif. Kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara keseluruhan terlihat belum mandiri karena pengelolaan keuangan daerah yang belum memaksimalkan pemanfaatan potensi rill daerahnya sehingga masih mendominasinya pendapatan transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebanyak 10

(sepuluh) daerah masuk kategori “Tinggi” dengan persentase rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada diatas 75%. Hal ini memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah yang belum secara konsisten menurunkan tingkat ketergantungan daerahnya yang tinggi terhadap dana transfer. Kota Jambi sebagai daerah dengan tingkat ketergantungan yang paling baik dinilai telah cukup baik dalam mengurangi ketergantungan. Hal ini tergambarkan melalui perolehan rasio dibawah 75% dan masuk kategori “Sedang”.

4. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) daerah memperoleh persentase rasio berada diatas 100% dan dikategorikan “Sangat Efektif”, serta 3 (tiga) daerah yang masuk kategori “Cukup Efektif” dengan perolehan rasio dibawah 100%. Hal ini memperlihatkan kapabilitas pemerintah daerah yang dinilai telah mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang dianggarkan. Sebanyak 3 (tiga) daerah dikategorikan “Kurang Efektif” dengan perolehan rasio dibawah 90%.
5. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau dari Rasio Efisiensi sebanyak 10 (sepuluh) daerah masuk kategori “Efisien” karena memiliki persentase rata-rata Rasio Efisiensi Belanja kurang dari 100%. Pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi atas penggunaan anggaran belanja daerahnya telah efisien, sehingga dianggap telah melakukan penghematan anggaran. Kabupaten Muaro Jambi menjadi satu-satunya daerah yang memperoleh persentase rata-rata Rasio Efisiensi Belanja $> 100\%$ sehingga dikategorikan “Tidak Efisien”.
6. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 jika ditinjau secara keseluruhan dari 5 (lima) rasio keuangan masuk kriteria “Cukup”. Hal tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang cukup dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak luput dari adanya keterbatasan. Berikut adalah hal-hal yang menjadi keterbatasan yang peneliti hadapi:

1. Penelitian ini belum melakukan pengujian dan pengkajian secara mendalam, misalnya determinan kinerja keuangan pemerintah daerah karena hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan 5 (lima) rasio keuangan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu penelitian yang relatif singkat yaitu tahun 2020-2022 sehingga kurang maksimal dalam memberikan gambaran perkembangan kinerja keuangan pada suatu kabupaten/kota.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang sebelumnya telah dijelaskan, berikut merupakan beberapa saran yang peneliti ajukan sebagai masukan dan perbaikan untuk:

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diharapkan memaksimalkan implementasi atas berbagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi daerah yang telah tersedia ataupun mengeksplorasi potensi baru sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan guna penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa langkah yang dapat diambil yakni:

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif dalam membayar tagihan pajak dan retribusi daerah.
- b) Menjalankan dengan maksimal dan tertib proses dalam memungut pajak dan retribusi daerah selaras dengan potensi yang objektif bersumber pada ketentuan yang berlaku.
- c) Menambah tempat hiburan, wisata baru, dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas tempat hiburan yang telah ada, guna menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diharapkan konsisten menaikkan realisasi penerimaan PAD sehingga PAD yang dihasilkan bukan sekadar memenuhi target tetapi dapat meminimalisir ketergantungan terhadap sumber dana eksternal dan memiliki kemandirian finansial yang tinggi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai hal dalam menetapkan target PAD melalui hasil pendataan potensi daerah serta kapabilitas pemerintah daerah dalam merealisasi target PAD di tahun sebelumnya. Adanya penetapan target PAD yang tinggi, diharapkan pemerintah daerah terus berupaya merealisasikan PAD yang tinggi pula sehingga mampu meningkatkan efektivitas PAD di tahun selanjutnya.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran melalui penganggaran yang sesuai dengan urgensi kebutuhan daerah sehingga penggunaan anggaran belanja tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dengan tetap memprioritaskan pengeluaran bagi keperluan daerah yang bersifat pelayanan publik.

2. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut secara lebih rinci dan mendalam mengenai kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam aspek keuangannya dengan melakukan peninjauan dari rasio keuangan ataupun aspek lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jangka waktu penelitian untuk melihat gambaran perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih optimal.